

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133-149.
- Badan Pusat Statistik. Persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi 2010-2035. Diperoleh tanggal 17 April 2014, dari [http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=).
- Darmawi, E. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 3(1).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2012. Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Firmanzah. Pembangunan partisipatif melalui UU Desa. Diperoleh tanggal 11 April 2014, dari <http://setkab.go.id/artikel-12385-.html>.
- Fuad, Noor, dan Achmad, G. 2004. *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ghufron, M. 2008. *Analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kementerian Keuangan. 2014. Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Buku induk kode data wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan. 2014. Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- Majalah Media Akuntansi. (2014 Oktober-November). Waspadai titik kritis pengucuran dana desa dan mencetak desa melek akuntansi. Majalah Media Akuntansi, hal. 28-31.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mangowal, J. 2013. Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi perdesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 5(1), 90-97.
- Miles, B. M. dan Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. UIP. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Bupati Mojokerto No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Mojokerto No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Mojokerto No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- PKP2A III LAN, Tim. 2008. Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di Wilayah Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, Lembaga Administrasi Negara-Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, 4(2), 1.222-1.247.
- Purwaningsih, E. 2008. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Rahman, F. 2012. Desentralisasi fiskal dan minimnya pembangunan di Indonesia. *Jurnal AKP*, 1(2), 103-114.
- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Setyoko, dan Paulus, I. 2011. Akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14-24.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo

- Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sirait, dan Robby, A. 2010. Pengaruh pengeluaran publik Pemda di Provinsi Jawa Barat terhadap angka kematian bayi; analisis data panel. Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukaesih, M. (2008). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan studi kasus kabupaten/kota di pulau Jawa periode 1995-1997 dan 2003-2006. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wicaksono, dan Kristian W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 21-28.
- Widjaya, HAW. (2005a). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Widjaya, HAW. (2005b). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.